


LAMPIRAN II	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	023a TAHUN 2025
Tanggal	:	14 April 2025

Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-F-12		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL</b>  <b>TIM KERJA</b>
Tanggal Pembuatan	14 April 2025		
Tanggal Revisi	14 April 2025		
Versi	1.0		
Klasifikasi Dokumen	Internal		
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		
<b>Nama SOP: PERIZINAN NON BERUSAHA – SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>			

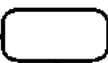
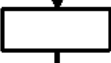
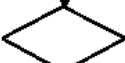
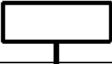
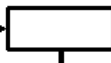
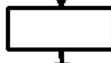

**Dasar Hukum :**

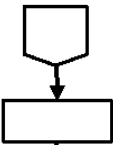
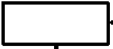





1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/0218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
9. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami peraturan dasar hukum pelayanan perizinan ( SMA/D-3/S1).
2. Memahami jenis-jenis perizinan (SMA/D-3/S-1).
3. Memahami prosedur pelayanan perizinan (SMA/D-3/S-1).
4. Memahami standar teknis pelayanan (SMA/D-3/ S-1).

<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Bidang PUPR</li> <li>2. SOP Bidang Kebudayaan</li> <li>3. SOP Bidang Pertanian</li> <li>4. SOP Bidang Kesehatan</li> <li>5. SOP Bidang Pendidikan</li> <li>6. SOP Bidang Sosial</li> <li>7. SOP Bidang Perhubungan</li> <li>8. SOP Kegiatan Penelitian – Kesbangpol</li> <li>9. SOP Kegiatan Pengabdian Masyarakat – BAPEDA</li> <li>10. SOP Kegiatan Periklanan</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. SIM Perijinan</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kendaran Bermotor (Roda 4 dan Roda 2).</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Perlengkapan lain-lain.</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan.</li> <li>2. Perlu ketelitian dalam entri data SIP Dokter OPD terkait dalam aplikasi Izinonline.</li> <li>3. Perlu ketelitian dalam validasi data.</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin</li> <li>2. Berkas permohonan Izin</li> <li>3. Rekomendasi Dinas Terkait Izin</li> <li>4. Berita Acara Penetapan.</li> <li>5. Izin yang dikeluarkan</li> </ol>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kesbangpol	Ka. Dinas	JF/Tim Kerja	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan izin kesehatan melalui <a href="https://izinonline.bantulkab.go.id">https://izinonline.bantulkab.go.id</a>					Aplikasi Izinonline	10 menit	Terunggahnya berkas persyaratan permohonan izin	
2	Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan					Berkas persyaratan Permohonan Izin	10 menit	Tervalidasinya berkas pemohon	
3	Persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, persyaratan benar dan lengkap diteruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Berkas persyaratan Permohonan Izin	10 menit		Berkas yg tdk lolos validasi diinformasikan kpd pemohon melalui aplikasi Izinonline
4	Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Berkas Permohonan	1 jam	Surat Rekomendasi	
5	Entri Data atas Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Aplikasi Izinonline	10 menit	Berita Acara Kajian Teknis/ Administrasi dan/ atau Rekomendasi, terentri	
6	Validasi Penetapan Izin			 		Aplikasi Izinonline	10 menit	Berita Acara Kajian Teknis/ Administrasi dan Draft Surat Izin	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kesbangpol	Ka. Dinas	JF/Tim Kerja	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Ketua Tim Kerja Menetapkan Izin					Aplikasi Izinonline	10 menit	Izin ditetapkan	
8	Penandatanganan Izin secara digital					Aplikasi Izinonline	10 menit	Izin ditandatangani	
9	Pemohon mengisi SKM dan mengunduh Izin					Aplikasi Izinonline		Formulir SKM terunggah dan Izin terunduh	
10	Mengirimkan salinan kepada instansi/ pihak terkait dan pemohon melalui aplikasi izinonline					Salinan dokumen Izin	1 hari kerja	Diterimanya dokumen salinan Izin	

**Riwayat Revisi**

No. Versi	Tanggal Revisi	Direvisi Oleh	Deskripsi Revisi	Disetujui Oleh
1.0	14 April 2025	Tim SMI	Terbit Awal	Manajemen Puncak

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal, 14 April 2025



KEPALA DINAS  
(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.)  
NIP. 196902041993032004